

Studi Komparatif Rencana Kontigensi Banjir Jakarta Sebagai Turunan Peraturan Gubernur, Kebijakan dan Pedoman yang Berlaku

¹M. Syahrul Rezi, ²Fathin Aulia Rahman,

^{1,2}Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

E-mail: ¹msyahrulrezi09@gmail.com, ²fathin.auliarahman@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Selama bertahun-tahun, bencana yang terjadi di Indonesia selalu menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa yang signifikan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa orang tidak tahu bagaimana melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani masalah ini. Provinsi Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan risiko bencana banjir yang tinggi di Indonesia. Pembahasan dokumen Rencana Kontinjensi terhadap peraturan perundangan, kebijakan dan pedoman yang berlaku belum banyak dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan studi komparatif rencana kontigensi banjir terhadap peraturan gubernur, kebijakan, dan pedoman yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dan Studi Kausal Komparatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan perbandingan hubungan antara substansi Rencana Penanggulangan Bencana Jakarta terhadap Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta sebesar; 67% berhubungan atau dengan kata lain sinkron, serta 33% tidak memiliki hubungan atau dengan kata lain tidak tersinkronisasi secara substansional. Rekomendasi yang diberikan yaitu pengintegrasian peta rawan banjir yang berisi zona bahaya dalam dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta untuk tahun perencanaan selanjutnya, sehingga kualitas produk perencanaan penanggulangan bencana menjadi lebih baik dan efektif.

Kata kunci : Kebijakan; Pedoman; Banjir; Jakarta

ABSTRACT

Disasters that have occurred in Indonesia so far have always caused large material losses and casualties. This incident shows a lack of knowledge and its application in daily activities regarding mitigation and preparedness in facing disasters. To overcome this problem, the government formed the National Disaster Management Agency (BNPB). Jakarta Province is one of the areas with a high risk of flood disasters in Indonesia. There has not been much discussion of the Contingency Plan document regarding applicable laws and regulations, policies and guidelines. The aim of this research is to conduct a comparative study of flood contingency plans against applicable governor regulations, policies and guidelines. This research uses descriptive research methods and comparative causal studies. Based on the analysis that has been carried out, a comparison of the relationship between the substance of the Jakarta Disaster Management Plan and the Jakarta Flood Contingency Plan is; 67% are related or in other words synchronous, and 33% have no relationship or in other words are not substantially synchronized. The recommendation given is the integration of a flood hazard map containing danger zones in the Jakarta Flood Contingency Plan document for the next planning year, so that the quality of disaster management planning products will be better and more effective.

Keyword: Policy; Guidelines; Flood; Jakarta

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan geografi, geologi, iklim dan struktur demografi, Indonesia menduduki peringkat ke-7 negara paling rentan terhadap bencana alam. "Indonesia terletak pada persimpangan 4 lempeng tektonik utama gempa, tsunami, termasuk jalur *Pacific Ring of Fire*, dipenuhi lebih dari 500 gunung berapi, terdiri dari sekitar 128 gunung berapi aktif, besarnya pengaruh perubahan iklim kian parah sehingga menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga tanah longsor." (Ruslanjari dkk, 2023).

Hingga saat ini, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia selalu menyebabkan banyak kerugian materi dan korban jiwa. Kasus ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan penerapan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, BNPB akan berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penanganan bencana. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008 membentuk BNPB. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang pencegahan bencana, dibentuklah BNPB. Menurut Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana, lembaga ini adalah lembaga pemerintah nondepartemen dengan wewenang setingkat menteri.

Luas wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta mencapai 661,52 km², yang menghadapi banyak masalah bencana. 40%, atau 24.000 hektar, dari wilayah ini adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan laut. DKI Jakarta juga merupakan tempat di mana banyak sungai mengalir ke selatan, dengan 13 sungai mengalir melalui Teluk Jakarta. Situasi ini jelas meningkatkan risiko banjir di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak hanya terancam banjir, tetapi juga terancam bencana lain seperti cuaca ekstrem,

gelombang ekstrem, gempa bumi, dan tanah longsor. Selain itu, ada juga bahaya nonalam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknis, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran gedung dan apartemen. Ancaman bencana banjir adalah topik diskusi utama dalam laporan tugas ini.

Risiko bencana, kerentanan, dan kemampuan mengatasi ancaman yang mempengaruhi risiko bencana banjir di wilayah metropolitan Jakarta. Ketika hujan deras terjadi dalam jangka waktu singkat, topografi lokal meningkatkan risiko banjir, daya mengurangi dukungan lingkungan dan menurunkan kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi bencana. Pembangunan infrastruktur dan penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh udara yang berlebihan meningkatkan risiko banjir dan meningkatkan kerentanan masyarakat di wilayah DKI dan Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta saat ini melaksanakan berbagai program masyarakat untuk menangani bencana, terutama penanganan banjir. Memberikan pendidikan kepada warga sekitar, mengidentifikasi wilayah rawan bencana, membangun dan menyiapkan jalur evakuasi, memberikan peringatan dini banjir, dan membentuk kelompok pencegahan bencana adalah beberapa metode yang digunakan untuk melakukan upaya ini. Pemangku kepentingan lainnya, seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, juga melakukan hal yang sama.

Kita harus terus mendorong dan mengembangkan inisiatif ini, Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan merupakan bagian dari upaya mensinergikan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011.

Ini Didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011.

2.2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan keluarnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tugas utama dan fungsi BPBD DKI Jakarta menjadi lebih jelas.

Diberikan penjelasan tentang struktur organisasi BPBD, serta tujuan utama dan fungsi departemen yang ada. Diharapkan BPBD dapat menyelenggarakan kegiatan pencegahan bencana secara menyeluruh dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh.

2.3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2017

Perencanaan kontinjensi menurut petunjuk teknis perencanaan bencana merupakan suatu proses dimana rencana ditentukan dan disusun berdasarkan situasi khusus atau kondisi yang tidak menentu. Rencana darurat mungkin tidak selalu aktif jika keadaan yang diharapkan tidak terjadi. Rencana kontinjensi setidaknya mencakup:

- 1) Dibuat sebelum kedaruratan/kejadian bencana
- 2) Rencana diukur

- 3) Terfokus pada kegiatan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat
- 4) Digunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman (single hazard)
- 5) Pelaku yang terlibat hanya terbatas sesuai dengan jenis ancaman bendanya
- 6) Untuk keperluan jangka waktu atau waktu tertentu
- 7) Sumber daya yang diperlukan untuk tahap "penyiapan"

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat perencanaan dan kebijakan untuk melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Perencanaan Kontinjensi Banjir Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dibuat berdasarkan perkiraan ancaman banjir masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan:

- 1) Perkiraan curah hujan lokal untuk daerah DKI Jakarta
- 2) Estimasi tingkat curah hujan di Depok, Bogor, Puncak, dan Cianjur.
- 3) Prediksi perkembangan muka air laut (ROB)

Selain itu upaya yang dilakukan adalah membuat skenario penanggulangan banjir sebagai berikut :

- 1) Penetapan Skenario, dimana skenario darurat banjir dibuat dalam 3 tahap, yaitu: Tanggap Darurat, Kesiapsiagaan dan Transisi ke pemulihan yang didasarkan pada data yang di dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan informasi dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung serta penghitungan kalender
- 2) Pengembangan Skenario, dengan mempertimbangkan kondisi kesiapsiagaan, kondisi tanggap darurat dan perkiraan Kronologis Kejadian Transisi ke Pemulihan.

Tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan darurat ini adalah sebagai

pedoman dalam menghadapi bencana banjir tahun 2017 yang dipicu oleh kondisi, standar dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dokumen Rencana Darurat Banjir Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 memberikan dasar untuk memobilisasi sumber daya pemangku kepentingan selama persiapan, respons, dan transisi pemulihan bencana untuk melakukan manajemen bencana yang cepat dan efektif. Dokumen ini juga memuat deskripsi upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal per klaster. Dokumen ini juga memberikan dasar untuk memobilisasi sumber daya pemangku kepentingan selama persiapan, respons, dan transisi pemulihan bencana. Di antara delapan klaster yang ditetapkan dalam perintah Dirjen BNPB, Pemprov DKI Jakarta memutuskan bersiap memenuhi kebutuhan tujuh klaster jika terjadi keadaan darurat, antara lain:

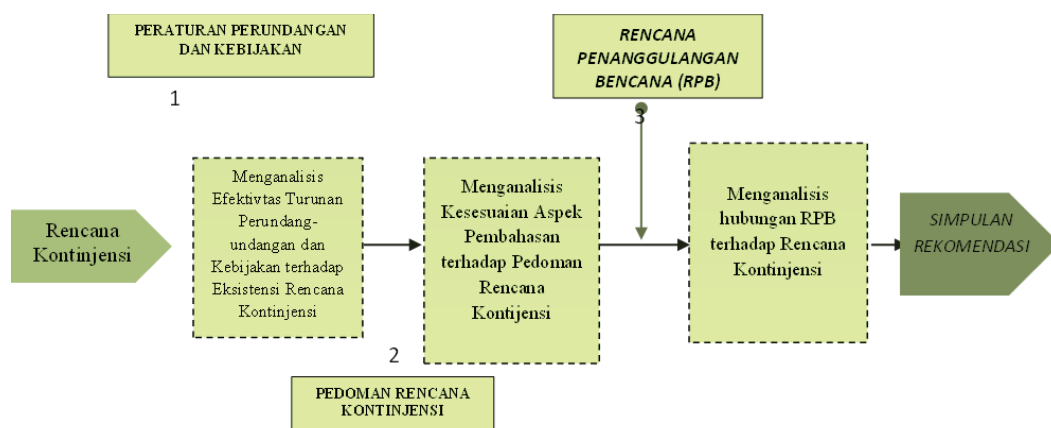
- 1) Klaster Pencarian dan Pertolongan.
- 2) Klaster Pengungsi dan Perlindungan,
- 3) Klaster Kesehatan.
- 4) Klaster logistik.
- 5) Klaster Sarana dan Prasarana
- 6) Klaster Pendidikan
- 7) Klaster Partisipasi Masyarakat.

3. METODOLOGI

Kajian terkait studi komparatif dokumen Rencana Kontinjensi terhadap

peraturan perundangan, kebijakan dan pedoman yang berlaku, menggunakan metode; 1) Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis fenomena atau ciri-ciri tertentu yang terjadi pada populasi atau wilayah tertentu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data secara sistematis dan menghasilkan deskripsi yang akurat dan faktual. Metode ini tidak berusaha untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi pada observasi dan analisis. Analisis ini memiliki pembahasan sistematis terkait ancaman bencana banjir yang memberikan dampak terhadap karakteristik masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Jakarta. 2) Penelitian kausal-komparatif mencari hubungan sebab akibat yang mungkin dengan melihat data dari faktor yang dianggap sebagai penyebab sebagai pembanding. Ini tidak melakukan eksperimen. Pada penelitian ini pengamatan Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta dibandingkan terhadap faktor-faktor pembanding di dalam peraturan perundangan, kebijakan dan pedoman yang berlaku sebagaimana telah tereferensi dalam substansi.

Kerangka berpikir disusun guna mempermudah pemahaman alur pembahasan penelitian Efektivitas Pembahasan Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta sebagai Turunan Peraturan Perundangan Setingkat Peraturan Gubernur, Kebijakan dan Pedoman yang Berlaku. Kerangka berpikir yang dimaksudkan terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Efektivitas Pembahasan Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah yang sering terkena dampak banjir. Risiko bencana banjir sangat tinggi di wilayah utara, tengah, timur, dan barat DKI Jakarta. Banjir di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan penggunaan lahan yang menyimpang dari fungsi ekologisnya, selain topografi alami dataran rendah dan drainase dari dataran tinggi. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di kalangan hilir, namun juga di kalangan menengah dan atas. Penggunaan air yang berlebihan untuk memenuhi beragam kebutuhan sektor industri, jasa dan domestik memperburuk krisis ekologi, intrusi air laut dan krisis air minum, keausan menyebabkan stres dan meningkatkan risiko bencana. Risiko banjir semakin meningkat.

4.2 Analisis Hubungan Rencana Kontinjensi Banjir DKI Jakarta dengan Rencana Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta

Rencana penanggulangan bencana harus mempertimbangkan kemungkinan bencana kontinjensi dan memiliki strategi yang efektif untuk menghadapi situasi tersebut. Rencana kontinjensi harus didasarkan pada analisis risiko bencana yang dilakukan dalam rencana penanggulangan bencana. Sehingga rencana kontinjensi dan rencana penanggulangan bencana dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana.

Analisis Hubungan Rencana Kontinjensi Banjir DKI Jakarta dengan Rencana Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta

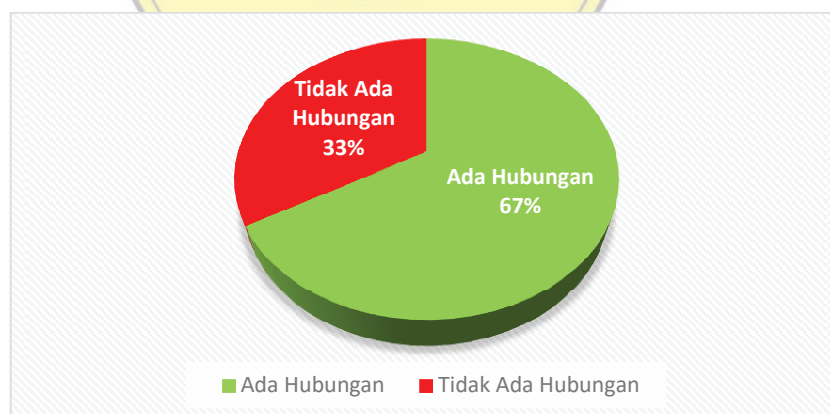
Tabel 1. Analisis Hubungan Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta dengan Rencana Penanggulangan Bencana di Jakarta

Rencana Penanggulangan Bencana Jakarta	Amanat bagi Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjadi bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi Jakarta. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Jakarta menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dari ancaman bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya hubungan top down dari tujuan ke-1 RPB yang memberikan amanat yang jelas agar dapat diacu dalam upaya penanggulangan bencana Jakarta khususnya banjir dalam bentuk rencana kontinjensi. Adanya hubungan bahwa tujuan ke-3 RPB diakomodir secara rinci dalam penyusunan komando skenario rencana kontinjensi. Adanya hubungan bahwa tujuan ke-4 RPB diakomodir dalam rencana kontinjensi dalam bentuk analisis dampak kependudukan, kewilayahan, obyek vital, transportasi sehingga dapat menyiapkan skenario evakuasi dan bantuan. Namun pada rencana kontinjensi banjir Jakarta 2017 hanya terdapat titik kumpul sebagai 1 faktor skenario evakuasi.

<p>Ruang Lingkup: RPB Provinsi DKI Jakarta memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di DKI Jakarta.</p>	<p>d. Pada substansinya masih belum terdapat sinkronisasi data dokumen, sebab Rencana Kontinjensi seharusnya mengacu hasil penilaian risiko bencana setidaknya dari RPB.</p>
<p>Gambaran Umum Wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geografi 2. Iklim 3. Fisiografi dan Geomorfologi 4. Demografi 	<p>e. Belum terdapat sinkronisasi data dokumen sehingga Rencana Kontinjensi tidak memiliki gambaran umum iklim, fisiografi, geomorfologi sebagaimana pada RPB.</p>
<p>Tata Ruang Wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Ruang 2. Pola Ruang Kawasan Lindung 3. Pola Ruang Kawasan Budidaya 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	<p>f. Belum ditemui adanya pembahasan tata ruang khususnya pembagian kawasan lindung (DAS) dan kawasan budidaya (perumahan, permukiman, perdagangan dan jasa) yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan obyek vital di Rencana Kontinjensi.</p>
<p>Gambaran Umum Kebencanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah dan data bencana (banjir, kebakaran, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, gelombang ekstrem dan abrasi, kegagalan teknologi, cuaca ekstrem, gempa bumi dan tanah longsor. 2. Trend kejadian bencana 	<p>g. Belum seluruh histori kejadian bencana banjir terakomodir dalam Rencana Kontinjensi.</p>
<p>Kajian Risiko Bencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian ancaman multi bencana 2. Kajian kerentanan multi bencana 3. Kajian kapasitas multi bencana 4. Hasil kajian per bencana 	<p>h. Belum terdapat sinkronisasi data hasil kajian risiko RPB dalam Rencana Kontinjensi mulai dari nilai ancaman banjir, kapasitas yang harus ditingkatkan dan index serta peta risiko banjir yang menunjukkan indeks banjir Tinggi.</p>
<p>Kebijakan Penanggulangan Bencana Visi: “Mewujudkan Jakarta yang tangguh terhadap bencana” Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat 2. Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan fungsi crisis centre, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan. 3. Meningkatkan kinerja dari sistem surveillance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular 	<p>i. Terdapat hubungan misi ke-7 dengan pola komando yang tercantum dalam Rencana Kontinjensi Banjir. j. Terdapat hubungan misi ke-8 dengan pola komando dan kegiatan yang berbunyi “Menyiapkan sarana pendampingan sosial & psikososial untuk warga terdampak yang dewasa, disesuaikan dengan adat istiadat setempat”. k. Terdapat hubungan misi ke-9 terhadap kebijakan Rencana Kontinjensi yang telah disusun</p>

<p>4. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>5. Memberi perhatian khusus terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta</p> <p>6. Meningkatkan penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia</p> <p>7. Menangani korban bencana</p> <p>8. Mendampingi korban bencana selama di penampungan;</p> <p>9. Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana.</p> <p>Progres Aktifitas Kerangka Kerja Hyogo Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Perkuat kesiapsiagaan bencana dengan menggunakan indikator-indikator berikut untuk memastikan respons yang efektif di semua tingkatan:</p> <p>a. Ketersediaan kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan dan mekanisme yang kuat dalam penanggulangan darurat bencana dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya</p> <p>b. Ketersediaan rencana kontinjensi terhadap potensi bencana di seluruh tingkat pemerintahan. Latihan diadakan secara berkala untuk menguji dan mengembangkan program darurat bencana.</p> <p>c. Ketersediaan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme berwawasan ke depan yang siap mendukung upaya manajemen darurat dan pemulihan bencana yang efektif</p> <p>d. Ketersediaan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pascabencana terhadap informasi relevan yang dipertukarkan selama fase tanggap darurat.</p>	<p>secara spesifik dengan fokus kebijakan: pernyataan status darurat, perlindungan-pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender dalam pelaksanaannya.</p> <p>1. PRB yang mengacu kerangka kerja Hyogo mengamanatkan ketersediaan rencana kontinjensi dalam hal ini untuk bencana banjir sebagai bencana prioritas Jakarta.</p>
<p>Kelembagaan dan Keterlibatan BPBD dan SKPD, lembaga dan instansi terkait</p>	<p>m. Ada hubungan bahwa dalam Rencana Kontinjensi mengakomodir berbagai keterlibatan pihak tercermin dalam pelaksana setiap klaster</p>
<p>Strategi dan Ruang Lingkup 1. Penguatan, Kesiapsiagaan dan Harmonisasi Peraturan</p>	<p>n. Ada hubungan bahwa dalam Rencana Kontinjensi merupakan perencanaan kesiapsiagaan sekaligus menjembatani teknis</p>

2.Peningkatan Kapasitas Stakeholder Penanggulangan Bencana 3.Perencanaan dan Implementasi Penanggulangan Bencana Terpadu	pelaksanaan saat terjadi bencana melalui skenario yang disusun															
<p>Upaya Penanggulangan Bencana Pendetailan 3 strategi ke dalam program dan kegiatan serta pihak terkait (SKPD)</p> <p>Pagu Indikatif 3030 Miliar Rupiah = 3,03 Triliun Rupiah</p> <table border="1" data-bbox="320 645 847 864"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Strategi</th> <th>Pagu Anggaran Dalam Milyar Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penguatan, penyusunan dan sinkronisasi regulasi</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penguatan kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana</td> <td>2130</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>3.030</td> </tr> </tbody> </table>	No	Strategi	Pagu Anggaran Dalam Milyar Rupiah	1	Penguatan, penyusunan dan sinkronisasi regulasi	300	2	Penguatan kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana	2130	3	Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu	600	Total		3.030	
No	Strategi	Pagu Anggaran Dalam Milyar Rupiah														
1	Penguatan, penyusunan dan sinkronisasi regulasi	300														
2	Penguatan kapasitas para pihak dalam penanggulangan bencana	2130														
3	Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana terpadu	600														
Total		3.030														
<p>Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Kemanfaatan 	o. Adanya hubungan yaitu efisiensi dan efektivitas diwujudkan dalam pengembangan skenario serta rencana operasional. Lalu kemanfaatan dalam rencana kontinjensi tercantum dalam rekomendasi rencana tindak lanjut yang memerlukan pembangunan jejaring yang lebih luas lagi untuk pengoptimalan penanggulangan bencana oleh berbagai pihak.															
<table border="0"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #92d050;"></td> <td>: Menyatakan adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px; background-color: #d62728;"></td> <td>: Menyatakan tidak adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi</td> </tr> </table>		: Menyatakan adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi		: Menyatakan tidak adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi												
	: Menyatakan adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi															
	: Menyatakan tidak adanya substansi berhubungan antara RPB dan rencana kontinjensi															



Gambar 2. Hubungan Substansi RPB dan Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta

Berdasarkan Gambar 2, jumlah substansi yang memiliki hubungan antara RPB dan Rencana kontinjensi berjumlah 67% dari tujuan RPB DKI Jakarta yaitu Sebagai landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi DKI

Jakarta, Rencana Induk Pembangunan Daerah harus dibuat secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. sesuai dengan amanat yang terdapat didalam Rencana kontigensi DKI Jakarta yaitu Adanya hubungan *top down* dari tujuan ke-1 RPB yang memberikan amanat yang jelas agar dapat diacu dalam upaya penanggulangan bencana DKI Jakarta khususnya banjir dalam bentuk rencana. substansi yang tidak memiliki hubungan antara RPB dan Rencana kontigensi berjumlah 33% bisa dilihat dalam kajian resiko bencana belum terdapat sinkronisasi data hasil kajian risiko RPB dalam Rencana Kontinjensi mulai dari nilai ancaman banjir, kapasitas yang harus ditingkatkan dan index serta peta risiko banjir yang menunjukkan index banjir tinggi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis perbandingan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan Rencana Penanggulangan Bencana Jakarta terhadap Rencana Kontinjensi Banjir Jakarta Tahun 2017 sebesar 67% berhubungan atau dengan kata lain sinkron, serta sebesar 33% tidak berhubungan atau dengan kata lain tidak tersinkronisasi secara substansional. Beberapa rekomendasi terkait masukan substansi yang harus terakomodir dalam Rencana Kontinjensi Banjir DKI Jakarta untuk tahun perencanaan selanjutnya sehingga kualitas produk perencanaan penanggulangan bencana baik dan efektif yaitu, a) menggunakan dan mencantumkan peta rawan bencana banjir berisi zona bahaya hasil analisis prediksi volume maupun area banjir secara spasial, sekurang-kurangnya bersumber dari RPB yang berlaku dan/atau penelitian terbaru, b) menggunakan dan mencantumkan nilai indeks risiko dan peta risiko banjir sekurang-kurangnya bersumber dari RPB yang berlaku dan/atau penelitian terbaru, dan c) merangkum secara *time series* histori kejadian banjir dari RPB dan

mencantumkannya dalam rencana kontinjensi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada penulis kedua yang telah mendampingi dalam penulisan artikel ini, dan Universitas Budi Luhur yang telah memberikan dukungan finansial sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). 2002. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Edisi I*. Jakarta: Direktorat Mitigasi Bakornas PB.
- Dewi, Anggraini. 2007. *Community Based Analysis of Coping with Urban Flooding : A Case Study in Semarang, Indonesia*. Tesis. The Netherlands: ITC.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
- Rahman, F. A. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Ancaman Multibencana. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(5), 550-558. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.112>

- Rahman, F. A., & Achadi, H. (2023). Pembentukan Kecamatan Pesanggrahan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 1(1), 13-26.
- Rahman, F. A., Ruslanjari, D., & Giyarsih, S. R. (2022). Strategi Adaptasi Masyarakat selama masa Pandemi Covid-19: Studi di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. *Jurnal Kawistara*, 12(1), 1-16.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.67782>
- Ramli, S. 2010. Manajemen Kebakaran. Jakarta: DIAN RAKYAT.
- Ruslanjari, D., Safitri, E. W., Rahman, F. A., & Ramadhan, C. (2023). ICT for public awareness culture on hydrometeorological disaster. *International journal of disaster risk reduction*, 92, 103690.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103690>
- Seri Forum LPPS No.43. Penanggulangan Bencana. 2001. Teori Dasar Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Jakarta: LPPS-KWI.
- Siswoko. 2002. Banjir, Masalah Banjir dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Himpunan Ahli Teknik Hidroulika Indonesia (HATHI).
- UN/ISDR.2009. *Terminology on Disaster Risk Reducation ERA/UNDP*. Panduan Desa Tangguh. Yogyakarta.